

## **BAB II**

### **PERTUMBUHAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI ORGANISASI KEMANUSIAAN**

Waktu merupakan pegangan untuk siapapun di dunia. Banyaknya waktu yang telah dilewati memberikan identitas bagi yang menapakinya. Aktifitas yang telah dijalankannya akan menjadi alat untuk memberikan informasi, siapakah dirinya. Bagi masyarakat dimanapun berada, ini digunakan untuk mengetahui (bila menggunakan standar positif dan negatif) efek yang merupakan pengaruh dari aktifitasnya.

#### **A. Sejarah Pertumbuhan Muhammadiyah**

Membahas hal ini dikarenakan arti pentingnya yang menjadi penetapan sasaran dakwah masa depan. Beberapa kemungkinan yang terjadi menjadi panduan bagi dakwah selanjutnya. Didapatkan dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses dakwah, yaitu faktor penetapan sasaran dan faktor yang terdapat pada proses penyelenggaraan dakwah.<sup>35</sup> Raden Ngabehi Muhammad Darwis (Ahmad Dahlan) mendirikan Muhammadiyah dikarenakan inspirasi dan kesadaran sebagai orang Islam. Kebijakan tersistem penjajah Belanda mengganggu apa yang selama ini dipercayai oleh masyarakat merupakan suatu hal mengejutkan.

---

<sup>35</sup> Rosyad Sholeh, "*Manajemen Dakwah Islam*", Suara Muhammadiyah, cetakan pertama, Juni 2010, hal 70

Sesuai apa yang ditulis Louis B Wright (1970) tentang representasi Eropa. Setelah pendekatan dengan jalan merampas sumber daya alam, dimana disimbolkan berupa kekayaan (*gold*) dan kejayaan (*glory*). Pada awal abad XVIII, Belanda mengikutsertakan pemuka agama dari Eropa (*gospel*). Seperti ini dianggap menjadi pengganggu Islam, dimana telah dikenal sebagai salah satu unsur signifikan dari identitas masyarakat.<sup>36</sup>

Masyarakat sebagai basis orientasi menjadi bagian penting dari ideologi gerakan. Segala sesuatu yang dilaksanakan Muhammadiyah periode awal ini menjadi sebuah langkah bersama dengan pihak lain. Pendekatan Muhammadiyah yang agak berbeda dengan organisasi Islam lain dikarenakan mengadopsi pelayanan agama penjajah Belanda. Antara lain mendirikan kompleks pelayanan tempat ibadah, pendidikan dan kesehatan yang menjadi ciri khas.<sup>37</sup> Muhammadiyah memodernkan sistem tradisional yang tersebar di kalangan kaum muslim Hindia Timur. Disinilah sistem pendidikan dengan dua ilmu yaitu ilmu agama dan ilmu umum.<sup>38</sup> Inilah yang menjadikan pada masa Ahmad Dahlan dianggap sebagai pembaharu dan liberal. Suatu hal yang kemudian dilanjutkan hingga masa kini. Berdasarkan hal inilah, masyarakat di luar Yogyakarta menjadi lebih tertarik kepada Muhammadiyah.

---

<sup>36</sup> Ahmad Najib Burhani, “*Muhammadiyah Jawa*”, Suara Muhammadiyah, Cetakan kedua, Oktober 2016, hal 12-14

<sup>37</sup> Ibid, hal 62

<sup>38</sup> Ibid, hal 27

Sebelum pendirian, banyak dialog yang dilakukan Ahmad Dahlan dengan rekan-rekan di Boedi Oetomo. Awal dialog terjadi, dalam hal ini dengan sosok terdekat yang membantu ketua Boedi Oetomo (dr. Sudiro Husodo) dalam bidang kedokteran, yaitu Joyosumarto. Dialog terjadi pada hari Ahad, saat Joyosumarto (bertempat tinggal di Dagen) berkunjung di Kauman. Kemudian diminta meluangkan waktu berkunjung di rumah Ahmad Dahlan. Dalam dialog ini, Ahmad Dahlan memberitahu keinginannya untuk bisa bersilatullah dengan pengurus Boedi Oetomo, Joyosumarto menyanggupi untuk memfasilitasinya.<sup>39</sup>

Perjumpaan pertama kali dengan Joyosumarto, kemudian berlanjut saat mendapat undangan menghadiri sidang pengurus. Tepatnya hari Sabtu malam Ahad sebagai tamu luar biasa untuk perkenalan di Ketandan Yogyakarta, rumah dr. Sudiro Husodo. Dalam organisasi ini, Ahmad Dahlan berpartisipasi memberikan dakwah Islam dalam bahasa Jawa, setelah rapat pengurus selesai. Disinilah tempatnya mengetahui cara pembentukan persyarikatan, menyusun pengurus dan sebagainya. Kemudian aktifitas dakwah ini berlanjut dalam acara yang dihadiri para guru sekolah menengah *Gouvernement*. Disini diajukan usulan kepada mereka, tentang ajaran Islam untuk siswa *Kweekschool* (Sekolah Raja) di Jetis Yogyakarta, dan para guru sependapat, karena menurut mereka

---

<sup>39</sup> "Cerita Tentang Kiyai Haji Ahmad Dahlan, Catatan Haji Muhammad Syoedja", hal 58-59

siswa membutuhkan.<sup>40</sup> Sangat mungkin filosofinya tentang keterbukaan, toleransi dan pluralitas disertai pelengkap etika dan prinsip untuk menggunakan akal sebagai alat terpenting melihat dan memahami agama menjadikan diperbolehkan mengajar di sekolah-sekolah pemerintah saat itu. Dalam bidang pendidikan inilah terjadi diskusi agama, dimana menjadi cikal bakal pemikiran mendirikan Muhammadiyah. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan berunding bersama Mas Budiharjo dan Raden Dwijosewoyo.<sup>41</sup>

Untuk melaksanakan syarat pendirian yang dianjurkan Boedi Oetomo, dimana untuk mengajukan berdirinya persyarikatan dan ijin *Recht Persoon* kepada pemerintah Hindia Belanda didalamnya terdapat tujuh nama yang terlibat. Maka anjuran ini diterima oleh: 1. Sdr. R. Haji Syarkawi Kauman 2. Sdr. Haji Abdulgani Kauman 3. Sdr. H.M. Syoedja' Kauman 4. Sdr. H.M. Hisyam Kauman 5. Sdr. H.M. Fakhruddin Kauman 6. Sdr. H.M. Tamim Kauman 7. Sdr. K.H.A. Dahlan sendiri.<sup>42</sup> Permohonan ini disetujui pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1330 H/ 18 November 1912 M.<sup>43</sup>

Muhammadiyah tumbuh dan berkembang. Sabtu malam Ahad, pertengahan bulan Maret 1917, kediaman Ahmad Dahlan yang biasanya

---

<sup>40</sup> Ibid, hal 60-62

<sup>41</sup> Ibid, hal 65-67

<sup>42</sup> Ibid, hal 69

<sup>43</sup> Ibid, hal 73

sebagai tempat belajar menjadi tempat sidang tahunan (kongres) perkumpulan *Boedi Oetomo*. Ahmad Dahlan sendiri merupakan satu dari sembilan orang pimpinan dan seorang dari tiga komisioner di Yogyakarta. Mereka yang telah mendengar pengajian Ahmad Dahlan kemudian mengajukan keinginan untuk membuka Muhammadiyah di tempat mereka tinggal. Meski kemudian terhambat surat keputusan pemerintah Belanda no.81 yang dikeluarkan 22 Agustus 1914, yang membatasi agar gerakan ini hanya di Yogyakarta.

Kongres *Boedi Oetomo* ini menjadi pemikiran kaum muda yang mendapat tugas melayani sidang ini. Berkumpul di rumah H.M.Syoedja', di Kauman mereka merenungkan betapa indah dan elok seandainya Islam itu dapat diterangkan di muka umum sebagaimana yang dilakukan oleh *Boedi Oetomo*. Oleh H.M. Syoedja', H. Fakhruddin, H.M. Tamimuddari, M. Ahmad Badar, H.M. Zaini Hasyim diwujudkan menjadi suatu perkumpulan (pengajian) yang diberi nama "Malam Djoem'ah" yang mempunyai tujuan menyiarkan agama Islam.<sup>44</sup> Disini juga dilakukan ramah tamah sambil memikirkan bagaimana dapat mengamalkan ajaran Islam yang terlahir dalam masyarakat. Keinginan melaksanakan perintah agama diwujudkan antara lain: pada acara tabligh luar kota dengan bantuan kawan-kawan yang memiliki sepeda, dalam perpustakaan

---

<sup>44</sup> Ibid, hal 87-92

dimulai cara sederhana dengan selebaran, buletin kepada masyarakat yang minta dan dipandang perlu, bagi Penolong Kesengsaraan Oemoem dimulai dengan membantu keluarga yang wafat salah satu anggota keluarganya dan terlantar dengan mencukupi kepentingan jenazahnya sampai dikebumikan. Tanggal 17 malam 18 bulan Juni 1921 (halaman berikutnya menyebut tahun 1920)<sup>45</sup> di Pendopo Pengajian Malam Jum'at di Kauman diselenggarakan Sidang Anggota Muhammadiyah Istimewa<sup>46</sup> yang dihadiri sekitar dua ratus anggota dan simpatisan. Sidang ini memutuskan empat bidang diterima dan diberi tempat sebagai bagian dari Muhammadiyah antara lain: 1) *Hoofd Bestuur* Muhammadiyah Bahagian Sekolah, diketuai oleh Sdr. H.M. Hisyam. 2. *Hoofd Bestuur* Muhammadiyah Bahagian Tabligh diketuai oleh Sdr. H.M. Fakhrudin. 3. *Hoofd Bestuur* Muhammadiyah bahagian Penolong Kesengsaraan Oemoem diketuai oleh Sdr. H.M. Syoedja' 4. *Hoofd Bestuur* Muhammadiyah Bahagian Taman Pustaka diketuai oleh Sdr. H.M. Mokhtar.<sup>47</sup>

## **B. Muhammadiyah Menjadi Ormas Kemanusiaan**

Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah mengalami perkembangan menjadi organisasi kemanusiaan saat memasukkan

---

<sup>45</sup> Ibid, hal 97

<sup>46</sup> Ibid, hal 93-96

<sup>47</sup> Ibid, hal 97

aktifitas menolong penderitaan masyarakat melalui *Hoofd Bestuur* Muhammadiyah. Disebutkan, Pengajian Malam Jum'at masa Ahmad Dahlan yang digagas oleh H.M. Syoedja', H. Fakhruddin, H.M. Tamimuddari, M. Ahmad Badar, H.M. Zaini Hasyim<sup>48</sup> seringkali dilanjutkan dengan ramah tamah sambil memikirkan bagaimana dapat mengamalkan ajaran Islam baik jasmani maupun ruhani. Masa sebelumnya, dakwah agama yang terjadi antara lain: melalui mubalighin dan mubalighat, melalui Pustaka dan adanya bantuan dengan Penolong Kesengsaraan Oemoem terhadap orang miskin dan anak yatim. Ini merupakan bentuk pelaksanaan perintah agama yang tercantum dalam kitab Al-Qur'an dan Al Hadits. Dalam pelaksanaannya ketiga hal ini mencari "penyandang dana" masing-masing. Meski masih merupakan bidang di luar organisasi Muhammadiyah, penghuni kampung-kampung dengan kesadaran sendiri menjadi donatur tiap bulan. Sehingga terlaksana proses dakwah: melalui tabligh keluar kota dengan bantuan kawan-kawan pemilik sepeda; melalui pustaka dengan selebaran, buletin kepada yang meminta dan yang dipandang perlu; melalui Penolong Kesengsaraan Oemoem, membantu warga yang kematian keluarganya

---

<sup>48</sup> Ibid , hal 87

terlantar, dengan mencukupi kepentingan jenazah hingga dikebumikan.<sup>49</sup>

Perkembangan ini berjalan satu tahun, hingga muncul pemikiran baru (bersama bidang pengajaran yang dipegang oleh sdr. H. Hisyam) dimasukkan dalam organisasi Muhammadiyah sebagai *Hoofd Bestuur* Muhammadiyah. Keempat ketua H.B ini dalam Rapat Anggota Muhammadiyah Istimewa (17 malam 18 bulan Juni 1920/1921?) diberikan pertanyaan oleh pimpinan. Berikut ketua H.B Muhammadiyah bagian Penolong Kesengsaraan Oemoem, H.M. Syoedja'. "*akan sampai kemana hendak melaksanakan pertolongannya kepada umum?*" Jawabnya, "*Hendak membangun hospital untuk menolong kepada umum yang menderita sakit*". Jawaban ini membuat kaget dan tertawa. Pimpinan masih bertanya, "*Dan selain daripada itu hendak membangun apa pula?*" H.M. Syoedja' menjawab, "*Hendak membangun Armhuis.*" Pendengar tinggal sedikit yang tertawa, mereka tenang dan diam seribu bahasa, karena agaknya masih merasa asing dalam bahasa itu. Sehingga pimpinan merasa perlu menanya, "*apa artinya bahasa Armhuis itu?*" Jawabnya, "*Menurut kata orang, Armhuis artinya adalah Rumah Miskin.*" Kembali banyak yang tertawa, kemudian pimpinan bertanya

---

<sup>49</sup> Ibid , hal 93-95



lagi, “hendak membangun apa lagi?” Jawabnya, “hendak membangun *Weeshuis*.” ..... “Apakah kata *Weeshuis* itu?” Jawabnya, “*Weeshuis* itu artinya *Rumah yatim*.” Banyak yang tertawa lagi bahkan ada yang terlanjur berkata, “*Itu kan pekerjaan pemerintah, apakah Muhammadiyah akan menjadi pemerintah?*” Pimpinan Ahmad Dahlan tetap tenang dan memberi isyarat supaya sidang tenang. Lalu mengucapkan terima kasih dan membaca *Alhamdulillah* serta bersyukur dihadapan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Murah dan mendoakan mudah-mudahan segala apa yang keluar dari ucapan yang suci dan murni dari Ketua-Ketua H.B. Muhammadiyah Bahagian tadi mendapat bimbingan serta taufiq dan hidayat daripada Allah SWT.<sup>50</sup>

Hal di atas berjalan baik ditopang menguatnya jaringan organisasi dengan adanya persetujuan secara formal melalui surat ijin no.40 yang diberikan pada tanggal 16 Agustus 1920. Dimana kemajuan dan pengembangan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Jawa dimungkinkan untuk ada. Bahkan disempurnakan kemudian dengan surat keputusan tanggal 2 September 1921

---

<sup>50</sup> Ibid , hal 98-102

mengenai bolehnya bergerak di seluruh kepulauan nusantara.<sup>51</sup> Ini merupakan awal penyebaran jaringan Muhammadiyah.

Berkaitan dengan satu periode kepemimpinan pengurus organisasi terbaru (2015-2020), maka Muhammadiyah dituntut untuk mewujudkan gerakan pencerahan (baca: pelayanan) yang mengandung misi dakwah membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan masyarakat segala bidang. Ini tentu memerlukan kemampuan, kecakapan, keterampilan atau keahlian. Keragaman komunitas menjadikan diperlukan kader-kader dengan kemampuan dan keterampilan khusus serta tidak konvensional. Visi pembaruan, kemampuan analisa dan mobilisasi sosial yang baik serta mampu merumuskan kepentingan komunitas dan memperjuangkan adalah diantaranya. Inilah ruang yang lebih luas dalam pelayanan untuk diimplementasikan. Disinilah peran infrastruktur yang dimiliki Muhammadiyah, aset yang selama ini menjadi penjelas identitas Muhammadiyah. Ini merupakan potensi sangat besar yang dimiliki Muhammadiyah untuk terus terlibat berkiprah membangun bangsa ini.

---

<sup>51</sup> Ahmad Najib Burhani, *op.cit*, hal 59

### C. Internasionalisasi Peran Muhammadiyah

Sebuah konferensi dunia yang didalamnya membahas tentang bencana alam (*World Conference for Disaster Risk Reduction/ WCDRR*) telah tiga kali diselenggarakan di Jepang. Pertama, pada tanggal 23-27 Mei 1994 di kota Yokohama. Dimana konferensi ini mengeluarkan sebuah keputusan yang menggunakan nama “*Yokohama Strategy and Plan of Action for a Safer World*”. Didalamnya mencakup bagian, antara lain:<sup>52</sup>

1. Penjelasan prinsip-prinsip yang menjadi dasar strategi pengurangan bencana.
2. Rencana tindakan yang disepakati oleh semua negara anggota PBB.
3. Pemberian beberapa panduan mengenai tindak lanjut tindakan.

Selanjutnya pada tanggal 18-21 Januari tahun 2005 di Kobe. Dalam konferensi *the UN's Global Platform for Disaster Reduction* (Platform Global untuk Pengurangan Bencana PBB). Dalam Konferensi yang dihadiri 168 pemerintah, dihasilkan kesepakatan untuk mengikuti serangkaian pedoman tindakan untuk mengurangi kerugian dan dampak bahaya alam. Disini dijelaskan, dideskripsikan dan dirinci pekerjaan yang dibutuhkan dari semua sektor dan aktor berbeda untuk mengurangi kerugian bencana. Berikutnya dikembangkan dan disepakati dengan

---

<sup>52</sup> [www.unisdr.org](http://www.unisdr.org)

banyak mitra yang terkoordinasi (pemerintah, lembaga internasional, ahli bencana dan sebagainya). Ada lima prioritas tindakan dan penawaran prinsip panduan dan cara praktis mencapai ketahanan bencana. Tujuannya secara substantif mengurangi kerugian bencana, dengan membangun ketahanan bangsa dan masyarakat.

“Kerangka Aksi Hyogo/ *Hyogo Framework for Action* (HKA/ HFA)” 2005-2015, antara lain:<sup>53</sup>

1. Memastikan bahwa pengurangan resiko bencana adalah prioritas nasional dan lokal dengan landasan kelembagaan kuat untuk implementasi.
2. Mengidentifikasi, nilai dan memantau resiko bencana dan meningkatkan peringatan dini.
3. Menggunakan ilmu pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat.
4. Mengurangi faktor resiko yang mendasari.
5. Memperkuat kesiapan menghadapi bencana untuk mendapatkan respon efektif di semua tingkat.

Kesepakatan yang dihasilkan ini dianggap belum memuaskan, sehingga muncul permintaan sekelompok NGO yang saat itu turut menghadiri. Hal ini dikarenakan bagi mereka, tidak mencakup penguatan

---

<sup>53</sup> [www.unisdr.org](http://www.unisdr.org), “*Hyogo Framework for Action*”

implementasi dan perubahan efektif pada masyarakat yang hidup dan bekerja dalam wilayah rentan bencana (*front-liner*). Kelompok NGO internasional ini meminta pendekatan *bottom-up* untuk mengurangi resiko bencana. Menurut mereka, mengurangi resiko bencana harus dimulai dengan memahami realitas manusia yang paling terkena dampaknya.

Tuntutan mereka yang semakin meluas pada pertemuan tersebut, berlanjut pada tahun 2007 dengan diselenggarakannya *Global Platform for Disaster Risk Reduction/ GPDRR* (Platform Gobal untuk Pengurangan Resiko Bencana) tanggal 5-7 Juni 2007 di Jenewa, Swiss. Disini dikenal dengan peristiwa terbentuknya GNDR. Dimana mereka berkeyakinan, bahwa masyarakat sipil akan memiliki efek lebih besar dalam memperkuat ketahanan masyarakat apabila dilakukan kerjasama. Diantaranya bukti banyaknya korban bencana lingkup nasional, regional dan global telah menghasilkan program pembelajaran dan tindakan efektif, perumusan kebijakan yang lebih dipengaruhi di tingkat global dan nasional, serta kampanye advokasi yang berhasil untuk menyoroti peran tersebut.<sup>54</sup>

*View from front-liner* (VFL), sebuah program yang secara unik mengetahui sebuah ancaman berdasar informasi masyarakat setempat. Baik yang bersifat harian maupun tertentu (luar biasa), yang mana

---

<sup>54</sup> [www.gndr.org](http://www.gndr.org), "Who Are GNDR"

berdampak bagi kehidupan masyarakat setempat atau lebih luas lagi. Aktifitasnya dimulai dengan percakapan individual dengan pemegang pengetahuan lokal tentang resiko dan ketahanan. Keunikan terletak pada kemampuannya mengumpulkan ribuan percakapan individual bersama-sama melalui metode analisis kualitatif dengan menganalisa apa yang manusia katakan. Kemudian dilanjutkan dengan penggabungan pengetahuan lokal, nasional bahkan global. Pengetahuan lokal tentang banyaknya ancaman yang mempengaruhi masyarakat merupakan komponen penting (garis dasar) penilaian efek lokal. Bencana yang terjadi berulang kali, lebih dari lima puluh persen kerugiannya dilupakan. Tidak tercatat, tidak diketahui dan tidak didukung. Tentu ini sangat mengganggu secara statistik dalam kerangka kerja untuk membantu yang diberlakukan. Secara media, per-undang-undangan, kebijakan maupun tindakan dalam mengatasinya. Ketahanan garis depan yang menunjukkan hubungan antara masyarakat dan ancaman yang dihadapi melingkari penyebab utamanya.<sup>55</sup> 16-19 Juni 2009 diselenggarakan kembali GPDRR di Jenewa, Swiss. Sesi kedua ini diakhiri dengan seruan untuk mengurangi separuh kematian akibat bencana. Sekitar 1.785 peserta menghadiri, didalamnya lebih dari 140 negara, 54 organisasi, termasuk badan khus PBB dan LSM. Disini diakui dengan adanya proses

---

<sup>55</sup> [www.gndr.org](http://www.gndr.org), "Frontline"

pengurangan resiko bencana yang telah dilakukan berdasar kepemimpinan dari Selatan. Target spesifik yang diidentifikasi meliputi: 2010, pembentukan komitmen keuangan nasional dan internasional yang jelas ke pengurangan resiko bencana atau DRR (*Disaster Risk Reduction*). Contohnya, alokasi sepuluh persen dari seluruh dana kemanusiaan dan rekonstruksi, satu persen dari dana pembangunan atau setidaknya tiga puluh persen dana adaptasi perubahan iklim. Tahun 2011, sebuah evaluasi struktural global untuk semua sekolah dan rumah sakit. Tahun 2015 pengembangan implementasi rencana tindakan perusahaan untuk sekolah dan rumah sakit yang lebih aman di semua negara rawan bencana. Semua daerah rawan bencana mencakup dan menerapkan tindakan penanggulangan pengurangan rawan bencana dalam kode bangunan dan penggunaan lahan.<sup>56</sup>

Sesi ketiga GPDRR yang diselenggarakan di Swiss diselenggarakan 9-13 Mei 2011. Berfokus pada pengurangan resiko bencana, pemulihan dan rekonstruksi. Dalam sesi ini perwakilan sektor kesehatan dilibatkan penuh, dengan lebih banyaknya presentasi sektor kesehatan. Didalamnya termasuk Bulan Sabit Merah dan Palang Merah Internasional (mengatasnamakan Aliansi Tenaga Kerja kesehatan Global), UNHCR,

---

<sup>56</sup> [sdg.iisd.org](http://sdg.iisd.org), “UN/ISDR Global Platform sets Specific Targets for Disaster Risk Reduction”, 22 Juni 2009

UNICEF dan WHO.<sup>57</sup> Pernyataan resmi yang kurang membahas kecenderungan penurunan bencana menimbulkan kekhawatiran, menghasilkan konsultasi dan publikasi pernyataan masyarakat sipil. Berdasar realita, fakta dan garis depan yang mengarah pada interpretasi kemajuan signifikan dalam mengurangi resiko bencana. Sesi ini menghasilkan sebuah usulan masa mendatang untuk mempercepat kemajuan lokal.<sup>58</sup>

1. Tanggung jawab pemerintah untuk melindungi warga negara dari bencana yang dapat dicegah dan dapat diduga, adalah membuat komitmen hukum berdasar hukum HAM internasional yang ada pada tahun 2013.
2. Pada tahun 2013, pemerintah suatu negara melakukan penilaian resiko partisipatif secara nasional di tingkat lokal dan melaksanakan audit reguler terhadap kemajuan pengurangan resiko bencana di tingkat lokal melalui sistem pemantauan, pelaporan dan verifikasi banyak pihak.
3. Pada tahun 2013, donor dan pemerintah pelaksana mengembangkan strategi keuangan yang inovatif untuk memobilisasi sumber daya dan memperkuat kapasitas tata kelola resiko lokal.

---

<sup>57</sup> www.who.int, "Health at the Global Platform for Disaster Risk Reduction", 22 Juni 2009

<sup>58</sup> www.gndr.org, "UN Global Platform for Disaster Reduction 2011"



4. Semua pelaku pengurangan resiko bencana harus memprioritaskan tindakan yang menangani pendorong resiko yang mendasarinya.
5. Menetapkan inisiatif banyak pihak untuk mengembangkan “kerangka kerja ketahanan umum untuk menyelaraskan berbagai intervensi pembangunan yang berbeda.

Sesi keempat, di tempat yang sama (merupakan sesi terakhir untuk periode 2005-2015) diselenggarakan dengan tema “*Invest Today to Safer Tomorrow*” pada tanggal 19-23 Mei 2013. Indonesia yang telah sukses menjadi tuan rumah *5th Asian Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction (5th AMCDRR)* tahun 2012 dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mendapat penghargaan sebagai sosok *Global Champion on Disaster Risk Reduction* berkeinginan terlibat lebih jauh. Dengan melakukan koordinasi informasi mengenai agenda *4th Global Platform for Disaster Risk Reduction* dan kerja partisipasi rangkaian aktifitas terkait. Didalamnya tentu saja bukan hanya sektor pemerintah yang terlibat, salah satunya Muhammadiyah. Sebagai konferensi ketiga bertema bencana, *World Conference on Disaster Risk Reduction* diselenggarakan di Sendai (Jepang). Indonesia terlibat secara langsung, diwakili unsur pemerintah dan non-pemerintah. Muhammadiyah sendiri dengan identitas organisasi dakwah turut serta melalui MDMC.

Tentu ini merupakan tindak lanjut menyikapi berbagai permasalahan yang dialami masyarakat. Awalnya pada tahun 2002, ditandatangani Buya Syafi'i Ma'arif (Ketua Umum PP Muhammadiyah) Lembaga Amal Zakat Infaq dan Sadaqah (LAZISMU) dideklarasikan. Selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama RI melalui SK No. 457/21 November 2002. Dikukuhkan kembali sebagai LAZNAS melalui SK Menteri Agama No.730/14 Desember 2016. Terkait diberlakukannya UU Zakat No.23 tahun 2011, PP No.14 tahun 2014 dan PMA No.333 tahun 2015.<sup>59</sup>

Latar belakang pendirian lembaga ini ada dua faktor: Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah; Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan.<sup>60</sup> LAZISMU sendiri mempunyai visi , “Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya”. Adapun misi: 1) Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan;

---

<sup>59</sup> [www.lazismu.org](http://www.lazismu.org),

<sup>60</sup> [www.lazismu.org](http://www.lazismu.org), “*Latar Belakang*”

- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif;
- 3) Optimalisasi pelayanan donatur.<sup>61</sup>

Program pendayagunaan LAZISMU berfokus pada: Pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial dan dakwah. Dalam operasional didukung jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh provinsi. Bidang/ area dari program LAZISMU adalah: ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, kemanusiaan, dakwah. Dalam cakupan program: nasional dan internasional.<sup>62</sup>

Misi pendayagunaan: Terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan pada masyarakat melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah.

Kebijakan strategis pendayagunaan:

1. Prioritas penerima manfaat adalah kelompok fakir, miskin dan fisabilillah.
2. Pendistribusian ZIS dilakukan secara terprogram (terencana dan terukur) sesuai core gerakan Muhammadiyah, yakni: pendidikan, ekonomi dan sosial-dakwah.
3. Melakukan sinergi dengan majelis, lembaga, ortom dan amal usaha Muhammadiyah dalam merealisasikan program.

---

<sup>61</sup> [www.online.lazismu.org](http://www.online.lazismu.org)

<sup>62</sup> [www.filantropi.or.id](http://www.filantropi.or.id)

4. Melakukan sinergi dengan institusi dan komunitas diluar Muhammadiyah untuk memperluas domain dakwah sekaligus meningkatkan *awareness public* kepada persyarikatan.
5. Meminimalisir bantuan karitas kecuali bersifat darurat seperti di kawasan timur Indonesia, daerah yang terpapar bencana dan upaya-upaya penyelamatan.
6. Intermediasi bagi setiap usaha yang menciptakan kondisi dan faktor-faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya.
7. Memobilisasi pelebagaan gerakan ZIS di seluruh struktur Muhammadiyah dan amal usaha.

#### Sinergi Pendayagunaan

Penyaluran dan pendayagunaan bersinergi dengan berbagai lembaga, baik internal maupun eksternal. Antara lain: Program pendayagunaan bidang pertanian, bersinergi dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah; Program kemanusiaan, bersinergi dengan Lembaga Penanggulangan Bencana (MDMC) PP Muhammadiyah; Masalah sosial bersinergi dengan MPS Muhammadiyah; Bidang ekonomi dengan MEK PP Muhammadiyah; pemberdayaan kaum perempuan bersinergi dengan PP Aisyiyah. Tujuan dari sinergi ini adalah pendayagunaan memberi manfaat yang maksimal

kepada masyarakat karena dikelola oleh lembaga pengelola yang *expert* serta menjangkau lokasi sasaran program yang lebih luas.<sup>63</sup>

Berikutnya berdiri lembaga yang merupakan pengembangan dari unit kegiatan Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat (MKKM) periode 2005-2010. Dikeluarkannya Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor: 58/KEP/I.0/2007 tentang penetapan Pengurus Pusat Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah (MDMC) dengan ketua Dr.H.M. Natsir Nugroho, Sp.Og, M.Kes. Penetapan ini berdasarkan rekomendasi internal Pasal 1 keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-45 tahun 2005. Untuk menjalankannya diputuskan, bahwa Badan Pengurus membutuhkan eksekutif pelaksana yang bertanggungjawab mengelola penanggulangan bencana secara holistik. Maka dikeluarkanlah SK MDMC Nomor: 001/MDMC/D/VI/2008 tentang penetapan Pengurus Harian MDMC periode 2008-2010 dengan mandat utama untuk menyiapkan MDMC secara kelembagaan, jejaring, peningkatan kapasitas, mengembangkan model intervensi pengurangan risiko yang khas Muhammadiyah serta aktifitas tanggap darurat yang dibutuhkan.<sup>64</sup> Pada

---

<sup>63</sup> [www.lazismu.org](http://www.lazismu.org)

<sup>64</sup> Risalah MDMC, “*Muhammadiyah dan Kesiapsiagaan Bencana*”, Cetakan I – 2009, Didukung oleh AusAID, hal 14

tahun 2010-2015 dirubah menjadi Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) dengan kedudukan setingkat Majelis.<sup>65</sup>

LPB didasarkan atas nilai-nilai atau keyakinan: (i) nilai dasar ajaran agama Islam “*rahmatan lil alamin*”, (ii) sejarah perjuangan Muhammadiyah sebelumnya, (iii) Lembaga Penanggulangan Bencana sebagai *leading sector* kekuatan Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana, (iv) tuntutan perkembangan kerja kemanusiaan global.

LPB sendiri memiliki visi “ Berkembangnya fungsi dan sistem penanggulangan bencana yang unggul dan berbasis Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kemajuan hidup masyarakat yang sadar dan tangguh terhadap bencana serta mampu memulihkan korban bencana secara cepat dan bermartabat”.

Sedangkan pada misi:

1. Meningkatkan dan mengoptimalkan sistem penanggulangan bencana di Muhammadiyah.
2. Mengembangkan kesadaran bencana di lingkungan Muhammadiyah.
3. Memperkuat jaringan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> “*Pedoman Struktur, Organisasi dan Mekanisme Kerja Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah*”, Lembaga Penanggulangan Bencana, PP Muhammadiyah, 2005, hal 5

<sup>66</sup> “*Pedoman Struktur, Organisasi dan Mekanisme Kerja Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah*”, Lembaga Penanggulangan Bencana, PP Muhammadiyah, 2005, hal 8

Dalam Laporan Pelaksanaan Program Kerja LPB 2010–2015 dijelaskan visi pengembangan periode ini adalah “Meningkatnya konsolidasi gerakan dan mantapnya manajemen organisasi di seluruh jenjang dan jenis kepemimpinan, serta untuk memobilisasi sumberdaya yang dimiliki Muhammadiyah bagi peningkatan kualitas dakwah yang dilakukan oleh persyarikatan dan amal usaha”.<sup>67</sup>

Pelaksanaan program diarahkan pada pendekatan Manajemen Bencana yang merujuk pada Kerangka Kerja Aksi Hyogo (*Hyogo Framework Action/ HFA*) 2005 – 2015. Sebuah kerangka yang dibuat di Kobe, Jepang pada bulan Januari 2005 yang dihadiri lebih dari empat ribu perwakilan dunia. Diputuskan: membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana. HFA diadopsi oleh 168 negara (termasuk Indonesia) untuk secara mendasar mengurangi kerugian akibat kejadian alam maupun bencana, baik korban jiwa maupun kerugian terhadap aset-aset sosial-ekonomi dan lingkungan suatu masyarakat. Tahun 2015 seperangkat prioritas diadakan dalam pencapaian tujuan ini, yaitu;

1. Membuat pengurangan resiko bencana (PRB) sebagai prioritas,
2. Memperbaiki informasi resiko dan peringatan dini,
3. Membangun budaya keamanan dan ketahanan,
4. Mengurangi resiko pada sektor-sektor utama,

---

<sup>67</sup> “Laporan Pelaksanaan Program Kerja Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2010 – 2015”, hal 1

## 5. Mempersiap kesiapan untuk reaksi terhadap bencana.

Disini ditekankan bahwa PRB merupakan isu sentral kebijakan pembangunan, selain menjadi perhatian berbagai bidang ilmu, kemanusiaan dan lingkungan. Bencana merusak hasil-hasil pembangunan juga menyengsarakan rakyat dan negara serta menjadi penghalang besar dalam pencapaian Sasaran Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals/MDGs*).<sup>68</sup>

Di sini terjadi kerjasama aktif antar lembaga dalam naungan Muhammadiyah. Penghargaan selain di dalam negeri sebagai organisasi masyarakat paling aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana, juga diperoleh dari lembaga dunia seperti UNICEF dan UNOCHA, Pemerintah Australia atau NGO Internasional seperti *Direct Relief International, Help Age Internasional dan Word Vision*.<sup>69</sup>

Program kerja secara khususnya adalah “Berkembangnya fungsi dan sistem penanggulangan bencana yang unggul dan berbasis *Penolong Kesengsaraan Oemoem* (PKO) sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kemajuan hidup masyarakat yang sadar dan tangguh terhadap bencana serta mampu memulihkan korban bencana secara cepat dan bermartabat”. Dalam muktamar Muhammadiyah 2010 diterangkan Program Pengembangan Penanggulangan Bencana:

---

<sup>68</sup> Risalah MDMC, “*Jamaah Tangguh Bencana*”, Cetakan I – 2009, Didukung oleh AusAID, hal 27

<sup>69</sup> Laporan Pelaksanaan Program Kerja Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2010 – 2015, hal 2



1. Mengembangkan kesadaran bencana di lingkungan Muhammadiyah, kampanye kesadaran menghadapi bencana di masyarakat, advokasi sistem penanggulangan bencana, dan usaha usaha lain dalam program rehabilitasi pasca tanggap darurat yang tersistem dengan program dan prinsip-prinsip gerakan Muhammadiyah.
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan sistem penanggulangan bencana dalam bentuk jejaring simpul-simpul tanggap darurat, rehabilitasi bencana di lingkungan Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana; peningkatan kapasitas kader, relawan, dan pengelola penanggulangan bencana. Meningkatkan keterpaduan dan kesiapan AUMKESOS dan Rumah Sakit dalam penanggulangan bencana, peningkatan kualitas tanggap darurat (*response time* dan mobilisasi), peningkatan kualitas manajemen dan pengadaan logistik tanggap darurat, serta advokasi dan reabilitas pasca bencana. Berkaitan dengan hasil Muktamar ke-45 dengan rencana strategis LPB, maka konsolidasi yang dilakukan adalah:<sup>70</sup>

Sistem Gerakan: Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memperkuat jaringan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Organisasi dan Kepemimpinan: menyusun standar kerja operasional (SOP) MDMC, mensosialisasikan SOP, menyusun protokol

---

<sup>70</sup> Risalah MDMC, “*Muhammadiyah dan Kesiapsiagaan Bencana*”, Cetakan I – 2009, Didukung oleh AusAID, hal 16-17

komunikasi yang efektif dalam penanggulangan bencana, mengembangkan MDMC sebagai lembaga pelayanan umat profesional, membuat program sadar bencana yang berkelanjutan. Jaringan: Mengoptimalkan peran jaringan Muhammadiyah dengan media massa, membangun sistem informasi bencana, menjalin kerjasama dengan pemerintah dan swasta. Sumberdaya: meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang sadar bencana dan meningkatkan keswadayaan lembaga seperti membuat lumbung bencana.

Aksi dan Pelayanan: meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana dan membentuk Satgas Penanggulangan bencana di PWM/PDM/PCM.

Berikut adalah akses yang tersedia bagi MDMC:

1. Majelis Dikdasmen (pendidikan kesadaran bencana).
2. MKKM (Tenaga Medis, Tenaga paramedis, Mahasiswa Bknakes, Jaringan Aumkes, Pekerja Sosial Kemanusiaan).
3. TSPM (Pengamanan Aset-aset Muhammadiyah Pasca Bencana).
4. Majelis Dikti (Keterlibatan PTM dalam Penanggulangan Bencana).
5. MPM (Analisis sosial rawan bencana, Rekontruksi dan rehabilitasi sosial, Resolusi konflik dan Rekonsialiasi, Pelatihan identifikasi posko bencana, Pengembangan komunitas lokal pasca bencana,

- memfasilitasi korban untuk pemenuhan hak dasar Advokasi, Advokasi regulasi tentang bencana).
6. Pemuda Muhammadiyah dan IMM (Tim Relawan).
  7. Nasyiatul Aisyiyah (Pendampingan pemulihan trauma tenaga perempuan untuk tanggap darurat Pendampingan Ibu dan Anak).
  8. IPM/IRM (Pendampingan Pelajar pasca bencana, Membangun kesadaran kesiapsiagaan bencana bagi pelajar).
  9. Majelis Ekonomi (Pemulihan Ekonomi).
  10. MTDK (Bimbingan Keagamaan oleh Dai penyuluh).
  11. MPK (Tenaga Ahli Pelatihan).
  12. Majelis Wakaf dan Harta Benda (Tim sertifikasi Aset Muhammadiyah Paska Bencana)
  13. Lembaga Pustaka dan Informasi (Pengelolaan web Suplay data dan informasi).
  14. LH dan HAM (Advokasi dan Hukum).
  15. Lembaga Lingkungan hidup (Pengetahuan dan mitigasi bencana ekologis).
  16. Hizbul Wathan (relawan HW untuk ditempatkan di daerah bencana).
  17. Aisyiyah/ MKLH (Pelayanan Kesehatan, Pemulihan lingkungan dan kesehatan, lingkungan Pendidikan kesadaran bencana).

Pada pelaksanaannya, pengembangan dari konsolidasi ini terdiri dari:<sup>71</sup>

1. Penyusunan buku Fikih Kebencanaan, dimana ini bisa dimasukkan dalam pengembangan sistem gerakan.
2. Tercapainya upaya koordinasi dan konsolidasi di tingkat nasional melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada tahun 2011 dan 2014 yang diikuti juga dengan kegiatan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di Pimpinan Wilayah. Ini merupakan pengembangan Organisasi dan Kepemimpinan.
3. Pada pengembangan Jaringan. Tercapainya hubungan intensif dan saling menguntungkan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kemenkes, dan organisasi masyarakat sipil bidang penanggulangan bencana dan kemanusiaan di tingkat nasional, juga hubungan baik dengan lembaga penanggulangan bencana internasional. Pengembangan jaringan internal Muhammadiyah sendiri tercapai melalui komunikasi aktif bersama Majelis Tarjih, Majelis Lingkungan Hidup, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pembina Kesehatan Umum, Majelis Pemberdayaan Masyarakat dan LAZISMU. Ditingkat wilayah dan daerah juga dilakukan dengan

---

<sup>71</sup> Laporan Pelaksanaan Program Kerja Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2010 – 2015, hal 2-4

- membentuk jaringan relawan dari unsur Angkatan Muda Muhammadiyah dan karyawan Amal Usaha Muhammadiyah, serta sistem *fundrishing* dengan LAZISMU tingkat wilayah dan daerah. Mendirikan MDMC di seluruh PWM dan PDM berdasarkan kesadaran Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah, juga berdasarkan upaya advokasi dan pendampingan dari MDMC PP Muhammadiyah.
4. Pengembangan Sumber daya. Tercapainya program pelatihan relawan Muhammadiyah melalui pengembangan kurikulum, silabus dan modul pelatihan, pelatihan relawan kesehatan, SAR, psikososial, logistik dan juga pendidikan, gladi kesiapsiagaan regional dan latihan gabungan relawan yang telah dilaksanakan baik di tingkat nasional maupun provinsi. Di luar negeri melalui pelatihan di Bangkok, Singapura dan Kuala Lumpur. Juga dilakukan kerjasama pengadaan perangkat operasi bersama Palang Merah Singapura. Dalam bidang kesehatan melakukan penguatan kompetensi melalui program AIFDR yang merupakan kerjasama Pemerintah Australia dan BNPB.
  - 5) Pengembangan Aksi Pelayanan. Tercapainya program aktif saat memberikan bantuan tanggap darurat dan rehabilitasi dalam koordinasi MDMC di dalam maupun luar negeri.

Keaktifan berkomunikasi dan kerjasama dengan lembaga dalam maupun luar negeri berlangsung, diwujudkan antara lain:<sup>72</sup>

- a. Dalam *Humanitarian Forum Indonesia*, Muhammadiyah selaku Ketua Dewan Pembina melalui guru besar Syafiq Mughni. Posisi anggota Dewan Pengawas melalui H. Budi Setiawan, Husnan Nurjuman, dan Ibu Hening Purwati, serta duduk sebagai wakil ketua melalui Rahmawati Husein.
- b. Dalam Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana, melalui Rahmawati Husein sebagai anggota Dewan Pembina, dan sebagai koordinator Cluster/ Koordinasi CSO melalui Arif Nur Kholis.
- c. Dalam Konsorsium Pendidikan Bencana , melalui Arif Nur Kholis sebagai anggota presidium.
- d. Dalam Koordinasi Kluster Pendidikan. Aktif dalam koordinasi dan berkontribusi sebagai fasilitator dalam berbagai kegiatan pelatihan.
- e. Dalam Koordinasi Kluster Kesehatan. Aktif dalam koordinasi dan berkontribusi berbagai upaya mengenai konsep Fasyankes Aman dan standar kompetensi tim medis darurat.

Jaman yang berubah seiring waktu berjalan, maka paradigma dalam pengelolaan bencanapun mengalami hal sama (transformasi). Awalnya,

---

<sup>72</sup> Ibid, hal 11

diketahui informasi bahwa pada jaman dahulu biasanya dalam menghadapi bencana maka tanggap darurat, bantuan makanan, pendirian posko-posko bencana dan lainnya merupakan hal yang dilakukan (*Relief or Emergency Management Paradigm/ Paradigma Pemulihan/Tanggap Darurat*). Berikutnya lebih menjurus ke fisik, misalnya pengaturan tata ruang atau pengaturan pembangunan gedung tahan gempa. Diistilahkan sebagai *Mitigation Paradigm* (Paradigma Mitigasi). Setelah aspek fisik yang dijalankan, maka dilibatkan juga aspek lainnya seperti ekonomi, sosial dan lain sebagainya (*Development Paradigm/ Paradigma Pembangunan*). Tindakan pencegahan dengan melakukan persiapan dan pengelolaan pasca bencana menjadi “jurus” baru. Disini ditujukan untuk mengurangi resiko (*Risk Reduction Paradigm/ Paradigma Pengurangan Risiko*).

Hal di atas sesuai dengan pengertian dakwah yang begitu luas. *Scope* kegiatan dakwah yang begitu kompleks bisa berjalan efektif bila menggunakan sumber daya yang secara kualitatif dan kuantitatif melaksanakan tugasnya. Lebih efektif dengan koordinasi dan kombinasi beserta susunan, aturan yang baik. Ditambah perencanaan dan persiapan matang. Disinilah *Leadership*, kemampuan dan keahlian manajemen merupakan faktor menentukan dalam proses dakwah.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Rosyad Sholeh, op.cit, hal 33-35

Berdasarkan pengertian resiko bencana, bahwa kerugian yang mungkin terjadi (kehilangan nyawa, cedera, kerusakan harta dan gangguan ekonomi) sebagai akibat suatu fenomena tertentu. Semuanya dianalisa tergantung berapa besar peristiwa itu mungkin terjadi dan besar kerugian yang diakibatkannya. Dua parameter inilah untuk mengidentifikasi besarnya potensi bencana dan besarnya kerentanan. Adapun faktor-Faktor yang mempengaruhi resiko bencana pada suatu daerah, antara lain:

1. Alam/ geografi/ geologi (kemungkinan terjadinya fenomena).
2. Kerentanan masyarakat yang terpapar terhadap fenomena (kondisi dan banyaknya).
3. Kerentanan fisik daerah (kondisi dan banyaknya bangunan).
4. Konteks strategis daerah.
5. Kesiapan Masyarakat setempat untuk tanggap darurat dan membangun kembali.

Dari pemaparan di atas inilah pengertian ancaman potensi bencana/ bahaya (*Hazard*) didapatkan. Didefinisikan, sebagai suatu peristiwa besar yang jarang terjadi, dalam lingkungan alam atau lingkungan binaan, yang mempengaruhi kehidupan, harta atau kegiatan manusia sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan bencana. Apabila terjadi dalam lingkungan permukiman, kegiatan budi daya atau industri dapat menimbulkan



kerugian fisik dan ekonomi atau mengancam jiwa manusia dan kesejahteraannya.

Pengertian mengenai kerentanan yang menjelaskan kondisi, jenis konstruksi dan kedekatannya kepada suatu daerah yang berbahaya atau rawan bencana. Ini mengungkapkan seberapa besar suatu masyarakat, bangunan, pelayanan atau suatu daerah akan mendapat kerusakan atau terganggu oleh dampak suatu bahaya tertentu. Karakteristik seseorang atau kelompok dan situasi di sekitarnya menjadi bagian yang mempengaruhi kapasitas untuk mengantisipasi, menghadapi, bertahan dan *recovery* dari dampak bahaya alam. Mengerucut pada obyek yang akan merasakan bencana, maka kemampuan dalam menghadapi, secara bertahap dikembangkan dengan berbagai sistem pendidikan yang diperkenalkan.<sup>74</sup>

Sebagai penguat, pengkajian kerentanan dan dampak yang terjadi pada masyarakat. Muhammadiyah telah mendirikan enam pusat studi bencana dalam naungan amal usaha, antara lain: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Surakarta (prodi Pend. Geografi) dan

---

<sup>74</sup> Risalah MDMC, “*Muhammadiyah dan Kesiapsiagaan Bencana*”, Cetakan I – 2009, Didukung oleh AusAID, hal 21-22

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (inisiasi).<sup>75</sup> Berkaitan dengan apa yang dinamakan “kemanusiaan”. Untuk menghadapi problem ini, Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan menyelenggarakan dan mengikuti berbagai aktifitas di dalam dan luar negeri. Tujuannya selain untuk menguatkan, juga menemukan langkah baru yang digunakan pada saat menjalankan dakwah. Ini merupakan ajakan kepada masyarakat Islam dimanapun berada untuk menjalankan keimanan dilandasi ilmu pengetahuan. Apabila para aktifis ingin menusuk “kerak bumi”, mereka harus menghubungkan program mereka dengan “akal sehat”. (“.....*If activists want to puncture the crust of convention, they must relate their programs to the “common sense” ....*”).<sup>76</sup>

MDMC (mewakili organisasi dan negara) terlibat dalam peningkatan keamanan kawasan serta meningkatkan ketahanan terhadap berbagai kejadian bencana yang terjadi di dunia kawasan timur melalui kerjasama antar negara. Pada tanggal 1 September 2012, di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta menerima kunjungan dari 30 orang peserta SEAS (*Symposium on East Asia Security*/ Simposium tentang Keamanan wilayah Asia Timur) dari 25 negara. Ini merupakan bagian dari acara program SEAS yang berlangsung tiga pekan, dimana tuan rumah yang disepakati adalah Amerika, Indonesia, Mongolia dan Philipina.

---

<sup>75</sup> Laporan Pelaksanaan Program Kerja Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2010 – 2015, hal 20

<sup>76</sup> Sidney Tarrow, *op.cit*, hal 61

Didalamnya terjadi diskusi tentang “Kerjasama Keamanan Regional: Mitigasi dan Ketahanan Masyarakat terhadap Bencana”. Acara di jalan Cik Di Tiro ini berupa presentasi tentang aktifitas Muhammadiyah sebagai bagian dari masyarakat sipil/ kelompok madani dalam upaya pencegahan, kesiapan maupun saat tanggap darurat dan rehabilitasi setelah kejadian bencana di Indonesia. Selanjutnya para tamu tersebut mengunjungi lokasi program rehabilitasi erupsi Merapi di desa Polengan, kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Dimana bertemu masyarakat korban erupsi Merapi tahun 2010 yang sedang dalam proses pemulihan ekonomi. Diharapkan dengan adanya SEAS dapat lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara, sehingga dapat meningkatkan kerjasama dalam bidang kemanusiaan serta pengelolaan bencana. Diharapkan kerjasama ini menjadi bagian dari bentuk kegiatan non-militer. Dimana fokusnya kepada pembangunan berkelanjutan dan ketahanan masyarakat, khususnya berkaitan dengan masalah energi, air, penanggulangan bencana, keamanan pangan dan perubahan iklim.<sup>77</sup> Sikap responsif dalam tanggap bencana inilah yang membuat MDMC pada tahun 2013 dan 2014 mendapat penghargaan di ajang PBB.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> www.muhammadiyah.or.id, “*Bahas Penanganan Bencana, Pejabat Militer 25 Negara Temui MDMC*”, 1 September 2012.

<sup>78</sup> www.umy.ac.id, “*Dosen UMY Raih Penghargaan Tokoh Inspiratif dari BNPB*”, 20 Oktober 2015

Langkah berikutnya adalah dengan adanya pencantuman dalam tulisan hasil pemikiran muhammadiyah. Tanggal 19-22 Mei 2015 telah diselenggarakan Musyawarah Nasional Tarjih XXIX di Yogyakarta yang menghasilkan pemikiran tentang bencana. Pemikiran ini dituangkan dalam bentuk buku berjudul “Fikih Kebencanaan”. Berikut adalah penjelasan buku Fikih Kebencanaan mengenai al-Quran dan Hadits yang menyebutkan istilah tentang bencana memiliki variasi dengan penekanan dan konteks berbeda. antara lain:<sup>79</sup>

1. *Musibah*. Berasal dari kata *a-sa-ba* yang berarti sesuatu yang menimpa kita. Secara umum ditujukan pada sesuatu yang netral (tidak positif maupun negatif) meski beberapa ayat mengaitkan dengan sesuatu yang negatif. Dalam konteks ini merupakan peristiwa yang menimpa manusia baik dalam peristiwa alam maupun sosial.
2. *Bala'*. Dijelaskan bahwa dalam Q.S.al-A'raf (7):168, kata *bala'* sesungguhnya lebih bermakna sebagai “cobaan untuk memperteguh keimanan” yang bisa berupa peristiwa menyedihkan atau menyenangkan. Berdasarkan ayat di atas, ujian atau cobaan baik yang berupa kebaikan (*hasanat*) ataupun yang berupa keburukan (*al-sayyi'at*), baik yang datang dari kejadian di alam semesta (gempa

---

<sup>79</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “*Fikih Kebencanaan*”, hal 12-36

- bumi, tsunami, banjir, tanah longsor dll) atau dari diri sendiri dan sosial kemasyarakatan (sakit, kerusuhan, kekurangan dll).
3. *Fitnah*. Berasal dari *fa-ta-na*, yang arti asalnya الأَبْتِلَاءُ (cobaan), الأَعْمِتَانُ (ujian) dan الأَعْتِبَارُ (ujian). Mengacu pada beberapa arti, antara lain kemusyrikan, cobaan atau ujian, kebinasaan/ kematian, siksa atau azab. Peristiwa-peristiwa yang berlabel fitnah mengacu pada peristiwa sosial bukan peristiwa alam. Didefinisikan sebagai sebuah peristiwa yang berasal dari hubungan antar manusia, yang mana memunculkan dampak negatif berupa kematian, ketakutan, kesesatan dan kericuhan.
  4. *'Azab*. Berasal dari kata *'a-za-ba* yang artinya sangat bervariasi sesuai dengan *konteksnya*. Dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, *'azab* bermakna sesuatu yang membuat tersiksa. Namun bila dikaitkan dengan berbagai peristiwa yang menimpa manusia berarti siksaan. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. al-Dukhan (44):15-16.
  5. *Fasad*. Berasal dari kata *fa-sa-da*. Dalam lisan arab diartikan sebagai lawan dari kata shalah. Shalah berarti bagus, baik dan damai, dengan demikian arti *fasad* berarti tidak bagus, tidak baik dan tidak damai.
  6. *Halak*. Secara bahasa berarti mati, binasa dan musnah. Dalam hal ini *dihubungkan* dengan tindakan Allah memusnahkan, mematikan atau membinasakan baik individu maupun kelompok.

7. *Tadmir*. Berasal dari kata *dam-ma-ra* yang berarti menghancurkan, sehingga kata *tadmir* berarti kehancuran. Q.S. al Ahqaaf (46):24-25 menjelaskan bahwa istilah ini merupakan sifat dari sebuah kejadian yang buruk bagi manusia, yakni sifat “hancur sehancur-hancurnya”. Ini merupakan konsekuensi bagi perbuatan salah manusia.
8. *Tamziq*. Ini merupakan bentuk kata benda *maz-za-qa* yang berarti kehancuran. Definisi istilah ini sama dengan istilah *Tadmir*.
9. *Iqab*. Berasal dari kata *a-qa-ba* yang berarti membalas, menghukum. Istilah ini merujuk pada peristiwa yang akan didatangkan oleh Allah bila manusia mendustakan Allah dan Rasul.
10. *Nazilah*. Berasal dari kata *na-za-la*. Apabila tidak memerlukan obyek berarti “turun”, sedangkan bila menggunakan obyek berarti “menurunkan”.

Selanjutnya Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah kemudian menerjemahkan buku ini dalam bahasa Inggris dengan judul “*Coping with Disaster: Principle Guidance from an Islamic Perspective*”. Langkah penerjemahan dalam bahasa internasional ini sebagai sosialisasi terhadap masyarakat dunia mengenai sudut pandang Muhammadiyah dalam memaknai dan menyikapi kebencanaan. Kita meyakini bahwa agama Islam memiliki modal doktrinal yang luar biasa dalam menyikapi kebencanaan. Mengutip James Mittelman (2004) yang mengatakan bahwa

seorang manusia yang memiliki banyak informasi tentang globalisasi akan melakukan pencarian melalui pembacaan buku dan artikel ilmiah. Disinilah menurut Mittelman, globalisasi telah mengubah cara-cara dimana pengetahuan dihasilkan dan ideologi melahirkan, "Globalisasi menjadi bentuk kekuatan intelektual yang terkandung dalam sistem pengetahuan, disebarakan oleh otoritas yang dilembagakan, dan dimanifestasikan dalam ideologi neoliberal" (*"Globalization is becoming a form of intellectual power embodied in a knowledge system, propagated by institutionalized authority, and manifested in neoliberal ideology"*).<sup>80</sup>

Ini menjadi sarana bagus berkomunikasi dalam penentuan dakwah internasional yang dijalankan. Menghadapi jamaah berbeda budaya, adat dan latar belakang yang perlu dihadapi, termasuk pemerintah yang bertugas menyiapkan kebijakan suatu negara. Tentu peluang diterima lebih besar, dibanding langkah politik dalam dakwah yang dijalankan. Ditambah pembagian buku tersebut di atas. Ini merupakan dua wujud dari tiga belas Rekomendasi Muhammadiyah untuk isu-isu strategis keummatan, kebangsaan dan kemanusiaan universal. Antara lain: pertama, tanggap dan tangguh menghadapi bencana, kedua, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

---

<sup>80</sup> Sidney Tarrow, op.cit, hal 69

Persiapan mengikuti acara di Istanbul dilakukan dengan menggelar diskusi yang bertajuk Menuju Istanbul Turki, *World Humanitarian Summit* 2016. Acara ini juga diselenggarakan di gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta tanggal 18 Februari 2016. Ini merupakan persiapan untuk pengiriman delegasi ke Turki sebagai bagian dari *Humanitarian Forum Indonesia* (HFI) bersama Platform Nasional Pengurangan Resiko Bencana (PLANAS PRB). Acara ini dihadiri akademisi, pemerintah, lembaga usaha, CSO (*Civil Society Organization/* Organisasi Masyarakat Sipil) dan kelompok agama. Keragaman etnis, agama dan kultur menjadi tantangan dan juga modal dalam menghadapi krisis kemanusiaan global. Dalam catatan HFI, penyelesaian krisis kemanusiaan, aktifitas kemanusiaan di Indonesia yang diakibatkan bencana, konflik, kekeringan, terorisme, kelaparan dan kemiskinan relatif telah terkelola baik.

Adapun yang dihasilkan berdasar diskusi di kantor PP Muhammadiyah ini adalah lima hal sebagai berikut:

1. Partisipasi yang melibatkan lebih banyak pihak baik dari unsur CSO, dan masyarakat bisa menjadi modal dalam pengelolaan isu kemanusiaan yang lebih terarah dan terukur. Masyarakat dapat dioptimalkan sebagai first responder dalam mengatasi di fase awal krisis. Semangat volunterisme juga bisa menjadi modal sosial dalam



- pengecahan dan penyelesaian krisis dengan mendorong gerakan *people to people*.
2. Pendanaan publik juga bisa menjadi solusi dalam penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan, tanpa harus bergantung dari pendanaan internasional. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar ke-2 di dunia, memiliki keunikan dalam pengelolaan dana publik yang dikelola oleh lembaga-lembaga berbasis agama, melalui akat, infaq dan sedekah.
  3. Para pelaku kemanusiaan di Indonesia yang dilakukan oleh NGO maupun organisasi masyarakat yang berbasis agama selalu menjaga akuntabilitas program/ kegiatan kemanusiaan yang dilakukan.
  4. Dalam melakukan kegiatan kemanusiaan, para pelaku kemanusiaan di Indonesia selalu melihat persamaan yang ada sebagai bagian ummat manusia di bumi sehingga bisa bekerjasama. Jika pelaku kemanusiaan melihatnya hanya kelompok agama/ kepercayaan tertentu, maka akan memicu konflik antar ummat beragama. Oleh karenanya, *code of conduct* menjadi pijakan pelaku kemanusiaan di Indonesia.
  5. Mendorong lembaga keummatan (*faith vased or religious organization*) di berbagai tingkatan (baik di level regional hingga global) untuk terlibat dan berbicara mengenai ajaran-ajaran kemanusiaan, dan terlibat dalam world humanitarian summit

sehingga mampu mendorong isu *interfaith* sebagai potensi dalam kegiatan kemanusiaan di dunia. Ajakan tokoh agama tingkat global mempunyai pengaruh terhadap para penganut, khususnya mereka yang sedang memimpin sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat tentang *interfaith*.<sup>81</sup>

Berikutnya 14 April 2016, penyelenggaraan Sosialisasi dan Jaring Masukan Daerah Menuju WHS yang terselenggara di *Green Host Boutique* Hotel Prawirotaman, Yogyakarta. Dimana ini merupakan kerjasama MDMC dengan Kemenlu RI. Peserta acara ini antara lain, Kementerian Sosial, Kementerian kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY serta puluhan lembaga kemanusiaan non-pemerintah yang bergerak dalam tataran masyarakat. Yogyakarta dipilih sebagai tempat acara dikarenakan pengalaman kemanusiaan yang sangat kompleks. Khususnya kejadian bencana alam yang tidak saja menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi resiko bencana, namun juga muncul berbagai aktor dan organisasi yang secara nasional memilih Yogyakarta sebagai pusat gerakan.

---

<sup>81</sup> disasterchannel.co, “Tantangan Menghadapi Masalah Kemanusiaan Global Asia Pasific”, 18 Februari 2016

Acara ini bertujuan untuk menjaring berbagai saran dan masukan yang akan menjadi misi serta masukan Indonesia dalam WHS di Turki. Agenda WHS sendiri antara lain:<sup>82</sup>

1. Upaya mencegah dan mengakhiri konflik.
2. Peningkatan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional.
3. Penanganan masalah migran iregular dan kelompok rentan.
4. Penguatan aktor-aktor kemanusiaan lokal serta perluasan sumber pendanaan kemanusiaan.

Dalam acara *World Humanitarian Summit* yang diselenggarakan di Istanbul, Turki pada tanggal 23-24 Mei 2016. Sebuah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang mempertemukan 55 kepala negara dan pemerintahan beserta para pejabat negara dari 173 negara. Ratusan perwakilan sektor swasta dan ribuan masyarakat sipil. Dimana terjadi diskusi untuk menemukan cara baru meringankan penderitaan, termasuk didalamnya mengatasi ketidakadilan sosial, ekonomi dan lainnya. Semuanya diperlukan solusi agar tidak membuat ketegangan semakin meningkat dalam konflik kekerasan.<sup>83</sup> Acara WHS dibuka secara resmi oleh Sekjen PBB Ban Ki Moon. Dimana Sekjen PBB mengungkapkan adanya lima komitmen inti yang harus dicapai. Antara lain: Pencegahan dan resolusi konflik, penguatan perlindungan terhadap kelompok sipil, merangkul dan

---

<sup>82</sup> www.mdmc.or.id, "Kemenlu dan MDMC Jaring Masukan untuk World Humanitarian Summit", 14 April 2016

<sup>83</sup> www.un.org, "As World Humanitarian Summit Concludes, Leaders Pledge to Improve Aid Delivery, Move Forward with Agenda for Humanity", 24 Mei 2016

melibatkan seluruh pihak, terpenuhinya sumber daya kemanusiaan, dan peningkatan investasi/ perhatian terhadap kebutuhan kemanusiaan. Dalam keikutsertaannya ini, Indonesia sendiri beranggotakan perwakilan instansi dan kementerian: Kemenko Polhukam, Bappenas, Kemenkes, Mabes TNI, Kemlu dan KBRI Ankara. Juga non-pemerintah seperti Muhammadiyah (MDMC), PMI, HFI dan Rumah Zakat.<sup>84</sup>

Berikutnya adalah aktifitas yang diselenggarakan di Indonesia, dimana berdasar waktu sebelum dan sesudah acara di Turki. Pertemuan para menteri ASEAN menjadi kancah keterlibatan Muhammadiyah (*Asean Ministerial Committee on Disaster Management*). Pertama diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 26-29 Maret 2016, dan kedua, di Manado pada tanggal 11-13 Oktober 2016. Penyelenggaraan berwilayah kawasan juga menjadi “lahan” bagi Muhammadiyah, seperti di New Delhi, India. Pada saat pra konferensi *Asian Ministerial Conferences on Disaster Risk Reduction 2016* bertempat di hotel Ashok 2 Oktober 2016, Rahmawati Husein bahkan menjadi salah satu panelisnya. Bersama Manu Gupta dari *Asian Disaster Reduction and Response Network (ADRRN)*, Nobuyuki Asai dari *Soka Gakkai International (SGI)* Jepang, Jessica Dator Bercilla dari *ACT*

---

<sup>84</sup> [www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id), “Indonesia Berpartisipasi Aktif dalam World Humanitarian Summit”, 24 Mei 2016

*Alliance*.<sup>85</sup> Selanjutnya adalah keterlibatan dalam acara *Global Platform for Disaster Risk Reduction* tanggal 22-26 Mei 2016 yang diselenggarakan di Cancun, Mexico. Wakil ketua MDMC juga menjadi panelis bersama Robert Thickner (*Australian Business Roundtable for Disaster Resilience and Safer Communities*), Luis Gomez Sanchez presiden *Centro Nacional De Apoyo Para Contingencias Epidemiologicas Desastres/ CENACED*) Mexico, Mustafa Ozhan Yagci, Co-Founder *Global Risk Management* (GRM) Iletism Ltd Turki dan Thomas Loster (Chairman *Munich Re Foundation*).<sup>86</sup>

Diinformasikan juga dalam hal ini, buku Fikih Kebencanaan merupakan panduan dua lembaga (MDMC dan LAZISMU) milik Muhammadiyah dalam rangka ikut membantu mengatasi masalah “sosial” masyarakat. Buku ini menjelaskan tentang kepemilikan potensi dan resiko negara kita berdasar letak geografis yang strategis. Resiko sebagai “pusat peradaban” dan “potensi alamiah” dijelaskan amat membahayakan dan menghancurkan. Munculnya hal tersebut ditambah kompleksitas kondisi masyarakat Indonesia, segi demografis (kepadatan penduduk) dan segi ekonomis (kemiskinan yang masih tinggi).<sup>87</sup> Apa yang dijelaskan, juga bisa dipergunakan untuk melakukan pertolongan masalah sosial melewati batas negara. Ilmu yang dijelaskan dalam buku

---

<sup>85</sup> www.mdmc.or.id, “Pesan Agama Efektif Diterjemahkan Dalam Upaya PRB di Indonesia”, 2 Oktober 2016

<sup>86</sup> menara62.com, “MDMC Hadir Dalam Global Platform Pengurangan Resiko Bencana di Mexico”, 28 Mei 2017

<sup>87</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Fikih Kebencanaan”, hal 1

ini bisa dipergunakan oleh siapapun dan organisasi apapun dan dari negara manapun. Terbitnya buku ini, yang mana menambah solusi baru dalam salah satu kasus dunia, dalam hal ini “bencana”. Menjadi pemberi informasi baru selain buku sebelumnya yaitu *Disaster Diplomacy*.

Peran buku yang bisa menjadi panduan bukan hanya di Indonesia menjadi pelengkap dan bahasa penyempurna saat Muhammadiyah *Aid* dijalankan. Sebagai ormas yang beranggotakan warga negara Indonesia, maka dalam hal ini segi Muhammadiyah Internasional bisa lebih banyak potensi untuk “lahir”. Kalimat “abad kedua” bagi Muhammadiyah yang selama ini menjadi amunisi terasa lebih lengkap. Muhammadiyah Indonesia menjadi bahasan penting akibat tindakan di wilayah negara maupun melewati batas negara. Pendekatan dakwah dengan strategi baru yang sebenarnya telah lama dilaksanakan. Keimanan dan ilmu pengetahuan merupakan dua dasar untuk menampilkan agama yang dianut. Tentu ini merujuk pada masa lalu (klasik) saat ilmu pengetahuan mulai dijadikan “raja” pada waktu Indonesia dalam cengkeraman Belanda. Ini sebenarnya bertujuan untuk mengurangi pengaruh besar yang selama ini diyakini oleh masyarakat Indonesia sejak masuknya Islam pertama kali di Nusantara.

Secara khusus, tulisan ini mengerucut pada peristiwa apa yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Suatu fakta kehidupan yang tak dapat

diingkari karena kemunculan tak terduga, tiba-tiba dan menimbulkan kerusakan serta dampak negatif lainnya. Bukan hanya permasalahan yang dikonotasikan dengan kehendak pencipta alam semesta ini saja, tetapi akibat perilaku manusia juga dimasukkan kedalamnya. Kesemuanya diistilahkan sebagai “bencana”. Dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, didefinisikan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Menurut UN ISDR (*United Nation International Strategy for Disaster Reduction/ Strategi Internasional untuk Pengurangan Bencana Persatuan Bangsa-Bangsa*) bencana diartikan sebagai suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian manusia, materi, ekonomi dan lingkungan yang meluas melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri.<sup>88</sup>

Muhammadiyah yang merujuk pada Al Quran Surat Ali’ Imran (3):104, berpandangan sendiri tentang bencana, dimana dikaitkan dengan

---

<sup>88</sup> Ibid, hal 9-10

pokok pikiran kedua Anggaran Dasar Muhammadiyah yang berbunyi "Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum *qudrat iradah*) Allah atas hidup manusia di dunia ini". Bencana dalam konteks Muhammadiyah didefinisikan sebagai "gangguan serius yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor manusia, yang bisa melumpuhkan fungsi-fungsi masyarakat yang dibangun untuk menopang keberlangsungan hidup, melindungi aset-aset, kelestarian lingkungan dan menjamin martabatnya sebagai manusia, sebagai bagian dari perintah agama. Lumpuhnya fungsi tersebut karena terjadinya kerugian dari sisi manusia, materi, ekonomi atau lingkungan yang meluas dimana melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri".<sup>89</sup> Istilah "bencana" mengutip kitab suci ummat Islam, bahwa Al Quran merupakan ayat *qaulliyah* (terucapkan, terfirmankan) yang bersanding dengan ayat *kauniyyah* (tercipta, alam semesta) mempertegas kebenaran apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada manusia.

Merujuk pada keputusan Munas Tarjih di atas, apa yang menjadi program dari misi kemanusiaan menjadi lebih tertib dan terkontrol. Peran Muhammadiyah dalam terlibat menghadapi suatu kasus sosial di masyarakat yang mulai melewati batas negara akan berdasarkan apa yang

---

<sup>89</sup> Ibid, hal. 11



tertulis pada salah satu bukunya ini. Dijelaskan, bahwa bencana bukan hanya murni karena alam (*natural disaster*) tapi juga karena ulah manusia (*man-made disaster*).<sup>90</sup> Disimpulkan berdasar adanya beberapa istilah terkait bencana yang tertuang dalam al-Quran dan hadits yang kemudian diketahui secara rinci berdasar tafsir yang telah diakui. Sehingga dijelaskan pada dasarnya adalah akibat perbuatan manusia.<sup>91</sup>

Bentuk bencana apapun yang terjadi, dijelaskan sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang Pencipta kepada manusia. Diharapkan pemahaman terhadap bencana akan melahirkan sikap arif dan bijaksana dalam menjalin hubungan dengan manusia lain maupun dengan alam. Permasalahan yang diharapkan solusinya adalah bagaimana cara pandang yang diperlukan saat menghadapinya. Sikap positif merupakan hal yang perlu muncul saat terjadi bencana. Pemerintah negara manapun, dalam hal ini sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dan mempunyai prioritas tertinggi dalam menghadapi masalah bencana. Muhammadiyah merupakan ormas yang memiliki keinginan untuk membantunya.

Untuk menguatkan misi kemanusiaan yang melewati batas negara dalam mengisi abad kedua, MDMC juga memperlebar tempat sumber daya manusianya. Tepatnya tanggal 6-7 Mei 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia dibentuk kepengurusan MDMC dan ini merupakan yang

---

<sup>90</sup> Ibid, hal 37-43

<sup>91</sup> Ibid, hal 35

pertama. Hal ini ditanggapi oleh salah seorang sesepuh PCIM Malaysia Muhammad Arifin Ismail yang berkata, “*Saya semakin yakin bahwa MDMC ini sebagai perintis misi dakwah Muhammadiyah melalui pendekatan misi kemanusiaan dengan memenuhi kebutuhan hajat hidup manusia. Maka saya berpesan agar setelah ini MDMC bisa menjadikan semua kegiatan sebagai dakwah, bukan dakwah sebagai kegiatan*”.<sup>92</sup>

LAZISMU juga melakukan hal sama, dengan membuka kantor layanan di luar negeri: Malaysia, Korea Selatan, Taiwan dan Mesir.<sup>93</sup> Meski berjauhan tempatnya, donasi melalui LAZISMU tetap bisa dilakukan. Salah satunya saat pemberian sedekah kemanusiaan untuk korban kemanusiaan Rohingya dari LAZISMU Taiwan. Penyerahan simbolis dilakukan oleh ketua PCIM Taiwan, Ismail kepada ketua umum PP Muhammadiyah yang saat itu sedang berada di sana untuk kemudian disalurkan ke LAZISMU Pusat. Ini merupakan hasil dari tiga ranah sedekah yang dilakukan, yaitu: Sedekah Masjid dan Pondok; Sedekah Dakwah; serta Sedekah Kemanusiaan.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> www.muhammadiyah.or.id, “*Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah Kini Hadir di Malaysia*”, 8 Mei 2017

<sup>93</sup> www.lazismu.org, “*LAZISMU Akan Realisasikan Pembukaan Kantor Layanan di 4 Negara*”, 10 April 2017

<sup>94</sup> www.umm.ac.id, “*LAZISMU Taiwan Salurkan Bantuan Untuk Rohingya*”, 20 Desember 2016